

**LAPORAN AKHIR TAHUN
RENCANA KEGIATAN TERINCI MANAJEMEN
(RKTm)**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN**



Muhammad Nur Imansyah, S.Kom

BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2019

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul RKTM : Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
2. Unit Kerja : Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi
3. Alamat Unit Kerja : Kampus Penelitian Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 1^a, Cimanggu Bogor 16111
4. Sumber Dana : DIPA Satuan Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan
Hidrologi TA 2019
5. Status Penelitian : Lanjutan
6. Penanggung Jawab
 - a. Nama : Muhammad Nur Imansyah, S.Kom
 - b. Pangkat/Golongan : Penata /IIIc
 - c. Jabatan :
 - c1. Struktural : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c2. Fungsional :
7. Lokasi Kegiatan : Nasional
8. Agroekosistem : -
9. Tahun Mulai : Januari 2019
10. Tahun Selesai : Desember 2019
11. Output Tahunan : Laporan Keuangan dan Perlengkapan
12. Output Akhir : Laporan Keuangan dan Perlengkapan
13. Biaya : Rp. 117.500.000,- (Seratus tujuh belas juta lima
ratus ribu rupiah)

Koordinator Program dan Evaluasi

Penanggung Jawab RKTМ

Dr. Ir. Elza Surmaini, M.Si.
NIP. 19690124 199803 2 001

Muhammad Nur Imansyah, S.Kom
NIP. 19850301 201101 1 007

Mengetahui:
Kepala Balai Besar Litbang
Sumberdaya Lahan Pertanian

Kepala Balai Penelitian
Agroklimat dan Hidrologi,

Dr. Ir. Husnain, MP., M.Sc
NIP. 19730910 200112 2 001

Dr. Ir. Harmanto, M.Eng
NIP. 19671123 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Satuan Kerja (Satker) Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif pendukung kegiatan Penelitian khususnya yaitu layanan Manajemen Sumberdaya Lahan Pertanian. Dalam layanan Manajemen Sumberdaya Lahan terdiri dari 2 kegiatan masing-masing adalah pengelolaan keuangan dan perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian dan Manajemen Kepegawaian Kelembagaan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Kegiatan ini adalah kegiatan pendukung dengan judul Pengelolaan keuangan dan perlengkapan sumberdaya Lahan Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Terinci Manajemen (RKTm).

Kegiatan Pengelolaan keuangan dan perlengkapan terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu 1). Pengelolaan Keuangan yang laporannya dituangkan dalam Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis AkruaI (SAIBA) dan 2). Pengelolaan Aset Tetap dan Persediaan yang ditampung dalam Aplikasi Pelaporan (SIMAK BMN).

Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan kegiatan administrasi satuan kerja dan operasional perkantoran serta mendukung proses pengambilan kebijakan berkenaan dengan keberlangsungan tatanan kinerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pelaksana kegiatan yang telah berpartisipasi aktif. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun berjalan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Desember 2019
Kepala Balai Penelitian
Agroklimat dan Hidrologi,

Dr. Ir. Harmanto, MEng
NIP. 19671123 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
ABSTRAK.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Luaran yang diharapkan.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
III. BAHAN DAN METODE	4
3.1. Bahan	4
3.1.1. Bahan Dokumen Sumber	4
3.1.2. Bahan Penunjang	4
3.2. Metode.....	5
3.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan	5
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1. Hasil.....	8
4.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan.....	8
4.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN	8
4.2. Pembahasan	8
4.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan	8
V. KESIMPULAN DAN SARAN	16
5.1. Kesimpulan	16
5.2. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Perbandingan Realisasi per 31 Desember 2018 dan 2019.	11
Tabel 2. Neraca untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019 (SAIBA)..	12
Tabel 3. Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019	13
Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019.....	14
Tabel 5. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	14
Tabel 6. Persediaan per 31 Desember 2019	15
Tabel 7. Daftar Rekening Pemerintah.....	15

DAFTAR ISTILAH

SAIBA	: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat
TA	: Tahun Anggaran
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>

ABSTRAK

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Satuan Kerja Balai Agroklimat dan Hidrologi dengan kode satker (018.09.0200.648694.KD) di bawah Eselon II adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Kementerian Pertanian berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/barang dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Informasi dan data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara Semester II periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 Satuan Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi dengan Kode Satker (018.09.0200.648694.KD) telah disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang dimulai pada Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Pusat. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pemerintah melalui kementerian keuangan telah mewajibkan setiap instansi pemerintah yang mendapatkan anggaran dari APBN menerapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN) yang juga berbasis teknologi Informasi secara online.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma baru dalam proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja ini memerlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja untuk menghindari duplikasi dalam penggunaan anggaran negara. Oleh sebab itu setiap pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengelola anggaran secara tertib, taat aturan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pelaksanaan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporannya secara rutin dan berkala, maka Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi menetapkan satu unit kegiatan yang mendukung salah satu Tupoksi yaitu Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan.

Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dibentuk sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 huruf (g) yang menyatakan Menteri Negara Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang dimulai pada Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Pusat yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

PMK nomor 59 tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan dan pelaporan akuntansi Barang Milik Negara mutlak menjadi kewajiban setiap pimpinan satker, hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana pengadaan Barang Milik Negara.

1.2. Tujuan

- a. Melaksanakan pengelolaan penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi secara tertib, taat aturan, efektif, ekonomis, transparan, akuntabilitas dan tepat sasaran (Menyusun Neraca dan Laporan Keuangan).
- b. Menyediakan informasi dan laporan keuangan dan aset barang milik negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat diakses secara online dan terbatas oleh Kemenkeu secara berjenjang melalui Unit kerja eselon I dan Unit Akuntansi Wilayah masing-masing kementerian (Menyusun Neraca dan Laporan Barang Milik Negara).

1.3. Luaran yang diharapkan

- a. Laporan realisasi penggunaan anggaran akhir tahun dari masing-masing unit kegiatan (Neraca dan Laporan Keuangan).
- b. Laporan keuangan dan barang milik negara berdasar Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berkualitas menuju prinsip pemerintahan yang baik. (Neraca dan Laporan Barang Milik Negara).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi telah melakukan pemberdayaan SIM dengan melakukan pemutakhiran data, analisis keterkaitan dan pembinaan terhadap pelaksana dan pemakai SIM. Kemajuan Teknologi Informasi yang sangat pesat menghendaki sistem pelaporan keuangan dan sistem pelaporan Barang Milik Negara diwajibkan untuk setiap Satuan Kerja (Satker) harus menggunakan aplikasi SIM yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Pemutakhiran data terutama pelaporan Keuangan dan anggaran dan Informasi dinamika Barang Milik Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan. Anggaran negara sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Pengembangan Sistem Akuntansi Intansi di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dimulai pada tahun anggaran 2005 dan programnya terus disempurnakan. Secara tersurat, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di satu pihak, serta Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di pihak yang lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan dimana mulai TA 2015 diterapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA). Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam akuntansi pemerintahan Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud dan aset tidak berwujud. Untuk mencapai opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian maka sistem pelaporan harus mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh menteri keuangan selaku otoritas pengelola keuangan negara.

III. BAHAN DAN METODE

3.1. Bahan

Bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini terdiri dari Dokumen Sumber dan bahan penunjang.

3.1.1. Bahan Dokumen Sumber

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran
 - a. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
 - b. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL);
 - c. Pedoman Operasional Kegiatan (POK)
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - f. Kuitansi dan dokumen yang sah.
2. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi
 - a. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL);
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa;
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
 - g. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
 - h. Dokumen Aset Tetap;
 - i. Dokumen Konstruksi;
 - j. Bukti Kepemilikan BMN;
 - k. Faktur Pembelian;
 - l. Surat Keputusan Penghapusan;

3.1.2. Bahan Penunjang

1. ATK;
2. Komputer.

3.2. Metode

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan. Beberapa kegiatan dilakukan dengan cara perekaman dokumen sumber dan dilakukan processing data dengan menggunakan *software*. Prosedur perekaman/entri dan rekonsiliasi data ini meliputi penerimaan, pengiriman dokumen, verifikasi, perekaman dan pelaporan dengan uraian sebagai berikut:

3.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan

3.2.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kegiatan pengelolaan administrasi dan pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik pelaksanaan anggaran maupun yang meliputi perencanaan penggunaan anggaran dan perencanaan penerimaan negara bukan pajak.

Perencanaan penggunaan anggaran meliputi kegiatan meneliti dan mencermati pos pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA dan POK Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi selanjutnya disusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Selain itu juga dilakukan persiapan dokumen-dokumen pencairan, pencatatan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran dalam bentuk format standar sesuai ketentuan yang berlaku seperti BKU, Buku Kas, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Persekot, SPP, SPBY, SPM dan SP2D. Pencatatan dan pelaporan anggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker), yang terdiri dari SPM dan SILABI Bendahara Pengeluaran.

Perencanaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan cara menetapkan Jenis Penerimaan. Jenis penerimaan PNBP terdiri dari Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional. Dengan sistem anggaran baru rencana penerimaan dan penggunaan, khususnya penerimaan fungsional sudah merupakan satu kesatuan dengan DIPA. Sehingga perencanaan penerimaan termasuk penggunaannya dituntut penatausahaan yang lebih baik. Pelaporan PNBP dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMPONI yang dirilis oleh Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan anggaran meliputi kegiatan pencairan anggaran dari KPPN, pencatatan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran, pengendalian dan pembebanan anggaran sesuai output dan kelompok AKUN yang tertuang dalam DIPA dan POK Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi. Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan dengan cara menatausahakan dan mengendalikan sesuai MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan Jenis penerimaan PNBP.

Pelaporan terdiri dari pelaporan realisasi anggaran bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan sesuai output kegiatan dan laporan tengah tahun serta laporan akhir tahun kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran.

3.2.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN

1. Kegiatan Harian/Triwulanan/Semesteran

- a) Menerima dan memverifikasi Dokumen Sumber;
- b) Merekam transaksi keuangan;
- c) Melakukan posting data untuk transaksi yang telah lengkap dan benar;
- d) Melakukan rekonsiliasi data dan atau menerima hasil rekonsiliasi data;
- e) Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi Pengembalian Pendapatan;
- f) Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan;
- g) Menyampaikan Laporan Keuangan ke Unit Akuntansi Wilayah/Eselon 1;
- h) Menyampaikan Laporan Keuangan ke KPPN.
- i) Membukukan data transaksi BMN ke dalam BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, dan Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber;
- j) Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR, dan DIL;
- k) Membuat Laporan BMN pada akhir semester;
- l) Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan selambat lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan neraca tingkat UAKPA;
- m) Menyampaikan Laporan BMN berserta ADK ke UAPPBW/UAPPB-E1, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya suatu semester;
- n) Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.

2. Kegiatan Akhir Periode Akuntansi

- a) Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja, dan Realisasi Pendapatan;
- b) Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan;
- c) Menyampaikan Laporan Keuangan ke Unit Akuntansi Wilayah/Eselon 1;
- d) Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB);
- e) Meminta pengesahan penanggungjawab UAKPB atas LKB;
- f) Membuat Laporan BMN Tahunan berdasarkan saldo BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah;

- g) Meminta persetujuan penanggung jawab UAKPB atas Laporan BMN;
- h) Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB beserta ADK ke UAPPB-W dan UAPPB-E1. Untuk UAKPB Pusatselambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- i) Mengarsipkan BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, salinan LKB, dan salinan Laporan BMN secara tertib;
- j) Melakukan proses back-up data dan tutup tahun.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan

4.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan

1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Realisasi Anggaran Bulanan s/d Desember 2019;
2. Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun;

4.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Laporan Realisasi Pengembalian Belanja;
3. Laporan Realisasi Pendapatan;
4. Neraca;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Laporan Barang Kuasa Pengguna;
8. Laporan Persediaan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan

4.2.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan

- **Pelaksanaan Anggaran**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi tahun 2019 merupakan bagian dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan, Kementerian Pertanian. DIPA Tahun 2019 diharapkan menghasilkan 2 teknologi dengan nilai input sebesar Rp. 11.230.019.000, terdiri dari:

1800.202. Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian Tanah, Air, dan Lingkungan Pertanian

Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian Tanah, Air, dan Lingkungan Pertanian dengan nilai input sebesar Rp. 2.750.000.000 dan pengelolaan sumberdaya lahan pertanian mendukung adaptasi perubahan iklim dengan input Rp.500.000.000,

yang terdiri dari 8 (Delapan) sub output, yaitu:

1. Pemutakhiran Sistem Informasi Katam Terpadu untuk mendukung peningkatan Produksi Pangan Menghadapi Keragaan dan Perubahan Iklim dengan nilai input sebesar Rp. 300.000.000,-
2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Resiko Keragaman Iklim dan Iklim Ekstrim Mendukung Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian dengan nilai input sebesar Rp. 300.000.000,-
3. Pengembangan Key Area Keragaman Iklim Indonesia dan Dampaknya pada Produksi Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan dengan nilai input sebesar Rp. 250.000.000,-
4. Model Pengelolaan Air Terpadu untuk meningkatkan Indeks Pertanaman Tanaman Pangan dan Produksi Pertanian dengan nilai input sebesar Rp. 300.000.000,-
5. Penelitian dan Pengembangan Sistem Irigasi Modern untuk meningkatkan produksi Hortikultura yang hemat Air, Hemat Energi an Ramah Lingkungan dengan nilai input sebesar Rp. 328.308.000,-
6. Desain dan pengembangan teknologi pemanfaatan sumberdaya air untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi gogo dan palawija di bawah tegakan tanaman tahunan dengan nilai input sebesar Rp. 300.000.000,-
7. Pengelolaan lahan dan air menurut karakteristik hidrologis rawa pasang surut dengan nilai input sebesar Rp. 1.000.000.000,-
8. Pemutakhiran peta sumberdaya Agroklimat Indonesia untuk mendukung Perencanaan pertanian.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.687.225.634 atau 97,72 %.

1800.204. Diseminasi Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian

Diseminasi Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian dengan nilai input sebesar Rp. 600.000.000. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Desember 2019 sebesar Rp. 597.021.800 atau 99.50%.

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pengadaan Peralatan Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang berupa belanja modal

pengadaan GPS RTK (Global Positioning System Real Time Kinematik) dan Pengadaan monito CCTV Kalender Tanam dengan realisasi 99.77 % atau sebesar Rp.369.133.500,- dari pagu sebesar Rp.370.000.000,-

Layanan Internal dukungan manajemen Satker

Output Laporan layanan internal dengan nilai input sebesar Rp. 943.604.000,- terdiri dari 6 (enam) sub output, yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran dengan nilai input Rp.100.000.000,-
- b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dengan nilai input Rp.125.000.000,-
- c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan dengan nilai input Rp.117.500.000
- d. Pengelolaan Kepegawaian dengan nilai input Rp.117.650.000
- e. Pembinaan ,Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Satker dengan nilai inputRp. 168.850.000
- f. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan dengan nilai input Rp.314.604.000

Realisasi anggaran output ini sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi sebesar 884.759.961 atau 93.76 %.

Layanan Perkantoran

Output Layanan Perkantoran dengan nilai input sebesar Rp. 6.116.415.000 terdiri dari 2 (dua) sub output, yaitu sub output Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan dengan nilai input sebesar Rp. 3.845.265.000 dan sub output Operasional dan Pemeliharaan kantor dengan nilai input sebesar Rp. 2.271.150.000.

Realisasi anggaran output ini sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.872.606.676 atau 96.81 %.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target Penerimaan Dana PNBP Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi tahun 2019 sebesar Rp. 22.028.000,00. Realisasi pemanfaatan dana PNBP sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00 atau 0.00% dari pagu anggaran.

SAIBA dan SIMAK-BMN

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.249.940,00 atau mencapai 76,21% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp51.500.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 4.792.138.675 atau mencapai 37,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.12.665.170.000.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Perbandingan Realisasi per 31 Desember 2018 dan 2019.

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	51.500.000,00	55.104.440,00	107,00	120.521.170,00
Jumlah Pendapatan		51.500.000,00	55.104.440,00	107,00	120.521.170,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.795.265.000,00	3.625.646.254,00	95,53	3.916.493.846,00
Belanja Barang	B.4.	7.064.754.000,00	6.924.147.060,00	98,01	6.105.702.236,00
Belanja Modal	B.5.	370.000.000,00	369.133.500,00	99,77	396.756.000,00
Jumlah Belanja		11.230.019.000,00	10.918.926.814,00	97,23	10.418.952.082,00

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2018 sebesar Rp10.418.952.082 (93.37%) dan Realisasi Belanja TA 2019 sebesar Rp10.918.926.814 (97.23 %) Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.86% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan kegiatan RPTP (Rencana Penelitian Tingkat Peneliti) output 202 dan 209.
2. Kenaikan Pangkat pada Tunjangan Jabatan Fungsional.
3. Penambahan Pegawai Negeri Sipil 3 Orang pada Tahun 2019.
4. Sudah sepenuhnya terserap anggaran kegiatan penelitian dan manajemen dengan maksimal.

1. Penyusunan Neraca

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Tabel 2. Neraca untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019 (SAIBA)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	0,00	17.635.085,00
Persediaan	C.1.2.	1.907.900,00	2.252.400,00
Jumlah Aset Lancar		1.907.900,00	19.887.485,00
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	18.865.668.454,00	17.162.528.904,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	10.914.171.500,00	10.914.171.500,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	152.320.500,00	196.362.500,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	348.902.500,00	348.902.500,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5.	-16.996.445.619,00	-15.782.926.595,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.5.	-1.143.364.278,00	-768.713.212,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.5.	-17.906.079,00	-35.111.293,00
Jumlah Aset Tetap		12.123.346.978,00	11.602.462.390,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	129.675.000,00	129.675.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	44.042.000,00	87.216.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-153.197.906,00	-204.024.596,00
Jumlah Aset Lainnya		20.519.094,00	12.866404,00
Jumlah Aset		12.145.773.972,00	11.635.216.279,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0,00	17.635.085,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	17.635.085,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	12.145.773.972,00	11.617.581.194,00
Jumlah Ekuitas		12.145.773.972,00	11.617.581.194,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		12.145.773.972,00	11.635.216.279,00

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.931.500,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.077.531.701,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.071.600.201,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp32.905.940,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.038.694.261,00.

Tabel 3. Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	14.413.000,00	24.981.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		14.413.000,00	24.981.500,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.625.646.254,00	3.916.493.846,00
Beban Persediaan	D.3.	1.349.980.884,00	880.554.066,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.949.578.265,00	2.775.314.870,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	778.228.811,00	771.963.850,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.846.291.100,00	1.679.541.350,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	889.515.337,00	1.542.708.800,00
JUMLAH BEBAN		11.439.240.651,00	11.566.576.782,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-11.424.827.651,00	-11.541.595.282,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	32.650.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	40.691.440,00	62.889.670,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	412.500,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		40.278.940,00	95.539.670,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-11.384.548.711,00	-11.446.055.612,00

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp11.617.581.194,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.038.694.261,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.985.377.700,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp11.564.264.633,00.

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	14.413.000,00	24.981.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		14.413.000,00	24.981.500,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.625.646.254,00	3.916.493.846,00
Beban Persediaan	D.3.	1.349.980.884,00	880.554.066,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.949.578.265,00	2.775.314.870,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	778.228.811,00	771.963.850,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.846.291.100,00	1.679.541.350,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	889.515.337,00	1.542.708.800,00
JUMLAH BEBAN		11.439.240.651,00	11.566.576.782,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-11.424.827.651,00	-11.541.595.282,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	32.650.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	40.691.440,00	62.889.670,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	412.500,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		40.278.940,00	95.539.670,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-11.384.548.711,00	-11.446.055.612,00

4. Laporan Kas bendahara

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2019
Jumlah Saldo Kas	0.00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.907.900,00 dan Rp2.252.400,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh

dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Persediaan per 31 Desember 2019

Uraian Persediaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	1.907.900	2.252.400
Jumlah	1.907.900	2.252.400

5. Rekening Pemerintah

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Keuangan No. 37/PB/2013 tentang sistem penggajian PNS melalui giralisasi (bank), maka per 17 September 2013 Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi membuka rekening baru di Bank BNI 46 dengan nomor rekening 196033757. Pertimbangan membuka rekening pada bank tersebut a.l: 1) KPPN Bogor sudah bekerja sama dengan Bank BNI 46, sehingga akan lebih mempermudah dan mempercepat pencairan dana dari BUN, 2) adanya kemudahan dan fasilitas dari BNI 46 yang lebih baik dari bank lain. Untuk memenuhi peraturan yang berlaku maka rekening BRI yang digunakan untuk menampung dana dari mitra telah ditutup sejak tanggal 25 Oktober 2013, dan seluruh saldonya telah dipindahkan ke rekening yang baru di BNI 46.

Tabel 7. Daftar Rekening Pemerintah

No	Bank/ Rekening	Keterangan
1	Bank BNI KCU Bogor/ 0196033757	Rekening Bendahara Pengeluaran (RM)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Tahun Anggaran 2019 telah berjalan sesuai dengan rencana. Realisasi Belanja pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp 10.918.926.814,- (97,23%) dari Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp 11.230.019.000,-. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 311.092.186,- (2,77%).
2. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dari Pagu Rp. 11.230.019.000 sebesar 10.918.926.814 atau 97.23 % disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

5.2. Saran

Pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL sudah menggunakan sistem berbasis web, akan tetapi respon dan prosesing data dari server dan petugas masih belum sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu perlu untuk ditambah kapasitas server dan kecakapan petugas verifikasi rekonsiliasi agar proses validasi datanya lebih cepat dan perbaikan dapat segera dilakukan di tingkat Satker (apabila masih ada perbedaan data). Dengan demikian akan dapat diperoleh laporan keuangan yang handal dalam waktu yang lebih cepat. Perlu dukungan yang memadai, baik sarana prasarana maupun SDM yang menangani masalah pelaporan keuangan satker dan asset BMN. Untuk itu disarankan agar Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan senantiasa melibatkan tenaga-tenaga handal di bidangnya, selain pejabat dan staf di Bagian Tata Usaha, juga melibatkan pejabat di luar instansi, terutama terkait dengan pembinaan, pelaporan, konsultasi dan arahan untuk tercapainya laporan yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Pertanian, 1992. Panduan Operasional Subsistem Kepegawaian. Sistem Informasi Manajemen, Panduan 1. Software Release 1,1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta
- Badan Litbang Pertanian, 1995. Panduan Operasional Subsistem Monitoring. Sistem Informasi Manajemen, Panduan 9. Software Release 1,0. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta
- Badan Litbang Pertanian, 1998. Panduan Operasional Subsistem Program Penelitian. Sistem Informasi Manajemen, Panduan 14. Software Release 2,1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian, 1998. Buku Petunjuk Pengoperasian Perangkat Lunak Sub sistem Keuangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 1999. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 1999-2005. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian
- Direktorat Informasi Akuntansi, 2005. Modul Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Departemen Keuangan.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2005. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005, Nomor: 248.0/18-09.0/XII/2005, tanggal 1 Januari 2005.
- Pusat Data Pertanian, 1997. Sistem Pengkodean Unit Kerja Departemen Pertanian, untuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Proyek Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Pertanian, Pusat Data Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta.
- Pusgram 1998. Laporan Bulanan Pusat Penyiapan Program Penelitian. Bulan Desember 1998. Pusat penyiapan Program Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2005 Rencana Strategis Penelitian Tanah dan Agroklimat Tahun 2005-2011, Puslitbangtanak. Bogor.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.